



## The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) from Saudi Arabia to Indonesia in the Energy and Oil Sector in 2022-2023

Zakky Prastyo<sup>1\*</sup>, Sritami Santi Hatmini<sup>2</sup>

Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

**Corresponding Author:** Zakky Prastyo [zakky.prastyo@unisri.ac.id](mailto:zakky.prastyo@unisri.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Foreign Direct Investment (FDI), Indonesia, Saudi Arabia, Energy, Oil

*Received :* 14, October

*Revised :* 28, October

*Accepted:* 11, November

©2025 Prastyo, Hatmini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRACT

This study discusses Foreign Direct Investment (FDI) from Saudi Arabia to Indonesia in the energy and oil sector in 2022–2023. Saudi FDI is one of the main strategies in the implementation of Saudi Vision 2030 to encourage economic diversification. The research method used is descriptive qualitative with a literature study and documentation approach. The results of the study show that the increase in Saudi Arabian FDI has made a significant contribution to strengthening Indonesia's energy infrastructure, reducing oil import dependency, and creating jobs. The role of Indonesian trade diplomacy is very important in facilitating the entry of such strategic investments through negotiations and promotion in international forums. These findings reinforce the understanding that FDI is an important instrument in mutually beneficial bilateral economic relations.

---

## Dampak *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Arab Saudi ke Indonesia di Bidang Energi dan Minyak Tahun 2022-2023

Zakky Prastyo<sup>1\*</sup>, Sritami Santi Hatmini<sup>2</sup>

Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

**Corresponding Author:** Zakky Prastyo [zakky.prastyo@unisri.ac.id](mailto:zakky.prastyo@unisri.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* FDI, Indonesia, Arab Saudi, Energi, Minyak

*Received :* 14, October

*Revised :* 28, October

*Accepted:* 11, November

©2025 Prastyo, Hatmini: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Arab Saudi ke Indonesia pada sektor energi dan minyak pada tahun 2022–2023. FDI Arab Saudi menjadi salah satu strategi utama dalam implementasi Saudi Vision 2030 untuk mendorong diversifikasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan FDI Arab Saudi memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan infrastruktur energi Indonesia, pengurangan ketergantungan impor minyak, serta penciptaan lapangan kerja. Peran diplomasi perdagangan Indonesia sangat penting dalam memfasilitasi masuknya investasi strategis tersebut melalui negosiasi dan promosi dalam forum internasional. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa FDI merupakan instrumen penting dalam hubungan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan.

---

## PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak lama, mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki hubungan yang erat dengan Arab Saudi sebagai pusat dunia Islam (Sophianti, 2024). Meskipun Indonesia tidak menggunakan sistem negara Islam secara formal, nilai-nilai keislaman memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ikatan spiritual dan budaya ini memperkuat kerja sama bilateral, termasuk dalam bidang ekonomi seperti energi dan minyak (Anwar, 2022). Dalam konteks global, Arab Saudi selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Sumber daya alam yang melimpah ini menjadikan Arab Saudi pemain utama dalam pasar energi global. Sejak beberapa dekade terakhir, Arab Saudi telah menjadi mitra strategis bagi Indonesia, terutama dalam hal investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment* atau FDI) di sektor energi (Minhajuddin & Santika, 2023).

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi yang terus berkembang, memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak telah menjadi tantangan besar bagi perekonomiannya, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga minyak global. Dalam konteks inilah, investasi dari Arab Saudi menjadi sangat penting. Pada tahun 2022, Arab Saudi meningkatkan nilai investasinya di Indonesia, terutama dalam proyek-proyek besar seperti modifikasi kilang minyak dan pengembangan infrastruktur energi. Proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi energi domestik Indonesia, tetapi juga untuk membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas (ESDM, 2020).

Selain itu, Arab Saudi juga berkomitmen untuk berinvestasi di sektor infrastruktur lainnya di Indonesia. *Saudi Fund for Development* misalnya, telah terlibat dalam pengembangan proyek-proyek air bersih dan infrastruktur publik lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Proyek-proyek ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Investasi ini sejalan dengan strategi jangka panjang Indonesia untuk memperkuat infrastruktur nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Putri, 2024).

Arab Saudi sendiri saat ini sedang menjalani reformasi ekonomi besar-besaran melalui program *Saudi Vision 2030*, yang diluncurkan oleh Pangeran Muhammad bin Salman pada tahun 2016. *Vision 2030* bertujuan untuk mendiversifikasi perekonomian Arab Saudi yang selama ini sangat bergantung pada minyak bumi. Salah satu pilar utama dari *Vision 2030* adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak dan gas, serta memperluas investasi di sektor-sektor lain seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi. Dalam konteks ini, investasi di luar negeri, termasuk di Indonesia, menjadi salah satu strategi kunci untuk mencapai tujuan diversifikasi ekonomi Arab Saudi. Arab Saudi berharap bahwa melalui peningkatan FDI ke negara-negara mitra, mereka

dapat memperkuat hubungan ekonomi internasional sekaligus memperluas pasar bagi produk-produknya (Pertamina, 2023).

Dari perspektif Arab Saudi, peningkatan investasi di Indonesia didorong oleh dua faktor utama, yaitu *market seeking* dan *efficiency seeking*. Pertama, Indonesia menawarkan pasar yang sangat besar bagi Arab Saudi, terutama di sektor energi. Dengan populasi yang besar dan terus berkembang, kebutuhan energi di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini memberikan peluang pasar yang sangat menjanjikan bagi Arab Saudi untuk mengekspor produk energinya ke Indonesia, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk energi lainnya. Kedua, dari sisi efisiensi, Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik, yang merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Lokasi strategis ini menjadikan Indonesia tujuan investasi yang sangat menarik bagi Arab Saudi, karena memungkinkan negara ini untuk memperkuat kehadirannya di pasar Asia, yang semakin penting dalam perekonomian global (Rivki et al., 2023).

Kerja sama investasi antara Arab Saudi dan Indonesia mulai terbentuk sejak dekade 1970-an. Pada masa itu, fokus utama masih berada pada sektor non-riil seperti perbankan syariah. Perkembangan signifikan terjadi pasca 2016, ketika Arab Saudi meluncurkan Saudi Vision 2030. Strategi diversifikasi ini mendorong peningkatan FDI ke negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Salah satu tonggak penting adalah kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada 2017 yang menghasilkan berbagai MoU dan investasi, terutama di sektor energi. Kemajuan kerja sama ini berlanjut hingga 2022–2023, yang menjadi fokus utama penelitian ini (Syaputra & Prasodjo, 2023).

Investasi Arab Saudi di Indonesia menjadi lebih signifikan seiring peluncuran *Saudi Vision 2030* pada tahun 2016, sebuah strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan gas. Visi ini mendorong Arab Saudi untuk memperluas investasinya ke negara-negara strategis seperti Indonesia, yang memiliki pasar besar dan posisi geografis yang menguntungkan. Dalam periode 2011–2021, tercatat ada 294 proyek investasi Arab Saudi di Indonesia, dengan puncak nilai investasi mencapai USD 30,35 juta pada tahun 2015. Selain sektor energi, Arab Saudi juga berinvestasi dalam pengembangan ekonomi digital, seperti inisiatif *Umrah Digital Enterprise*, yang bertujuan meningkatkan layanan haji dan umrah bagi jutaan jamaah dari Indonesia (Hakim, 2023).

Kerja sama ini terus diperkuat melalui berbagai pertemuan bilateral, termasuk pertemuan G20 di Riyadh pada tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas peluang kerja sama lebih lanjut di sektor digital, energi, dan pariwisata. Proyek-proyek ini mencerminkan upaya bersama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mempererat hubungan ekonomi antara kedua negara. Sejarah FDI ini tidak hanya mencerminkan potensi strategis Indonesia bagi Arab Saudi, tetapi juga memperlihatkan kontribusi nyata terhadap penguatan hubungan bilateral di era modern (Damanik et al., 2023).

Pada tahun 2022–2023, terjadi peningkatan signifikan dalam aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Arab Saudi ke Indonesia di sektor energi. Momentum

ini penting karena mencerminkan perkembangan strategis dalam hubungan bilateral kedua negara, terutama pasca peluncuran *Saudi Vision 2030* yang mendorong diversifikasi ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Amelia Anwar dan Kevina Agatha Salwadi, penelitian ini secara khusus menempatkan sektor energi dan minyak sebagai fokus utama dengan menelaah dampak nyata dari investasi langsung Arab Saudi terhadap perekonomian Indonesia.

Reformasi ekonomi ini juga didorong oleh beberapa faktor global, termasuk penurunan harga minyak yang signifikan sejak tahun 2014. Pada tahun 2015, Arab Saudi mengalami defisit anggaran sekitar US\$100 miliar akibat turunnya harga minyak dunia dari US\$100 per barel menjadi hanya US\$40 per barel. Penurunan harga minyak ini memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara, yang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor minyak (Sianturi, 2017). Sebagai respons terhadap situasi ini, Arab Saudi berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak melalui diversifikasi ekonomi dan meningkatkan investasi di sektor-sektor non-minyak, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini juga didukung oleh kebijakan penjualan saham perdana Aramco, perusahaan minyak milik negara, dan penggalangan dana melalui *Public Investment Fund* (PIF), yang diharapkan dapat menyediakan modal yang diperlukan untuk investasi di berbagai sektor baru (Agustin, 2023).

Untuk tujuan kejelasan, penelitian ini memosisikan *Saudi Vision 2030* sebagai kerangka kebijakan yang mendorong ekspansi investasi Arab Saudi ke pasar luar negeri. Namun, kajian ini fokus empiris pada bentuk-bentuk FDI yang terealisasi di Indonesia (modernisasi kilang, infrastruktur LNG, proyek biofuel, gudang energi, dan program pelatihan teknologi energi) serta dampaknya terhadap kapasitas energi domestik, penciptaan lapangan kerja, dan perekonomian lokal pada periode 2022–2023. Dengan demikian penelitian tidak hanya membahas motivasi kebijakan Saudi, tetapi juga konsekuensi nyata investasi yang terwujud di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Kepentingan Nasional*

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu elemen utama dalam kajian hubungan internasional dan menjadi landasan dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara. Menurut Charles A. Beard (1934), kepentingan nasional adalah *raison d'état* atau alasan negara, yaitu motif utama yang melandasi setiap tindakan dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Negara, dalam pandangan Beard, tidak semata-mata bertindak atas dasar moralitas, melainkan demi mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhannya (Beard, 1934).

Selanjutnya, Hans J. Morgenthau (1948), tokoh realis klasik dalam hubungan internasional, menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah prinsip yang mendasari seluruh kebijakan luar negeri. Ia membagi kepentingan nasional menjadi dua bagian, yakni kepentingan primer yang tidak dapat dinegosiasikan seperti keamanan dan kedaulatan, serta kepentingan sekunder yang masih dapat dinegosiasikan. Bagi Morgenthau, kekuasaan (*power*) dan

kelangsungan hidup negara adalah inti dari kepentingan nasional itu sendiri (Morgenthau, 1948).

Donald E. Nuechterlein (1976) kemudian memberikan klasifikasi yang lebih sistematis terhadap konsep kepentingan nasional yang dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) kepentingan pertahanan dan keamanan (*defense interest*), (2) kepentingan ekonomi (*economic interest*), (3) kepentingan tatanan internasional (*world order interest*), dan (4) kepentingan ideologis (*ideological interest*). Model ini memberikan kerangka analisis yang lebih terstruktur untuk menilai berbagai kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

Menurut Donald E. Nuechterlein (1976), kepentingan nasional suatu negara dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, salah satunya adalah kepentingan ekonomi (*economic interest*). Kepentingan ekonomi merujuk pada segala tindakan dan kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, serta akses terhadap sumber daya dan pasar internasional. Dalam kerangka ini, suatu negara akan berupaya menjalin kerja sama internasional yang mampu menjamin pasokan energi, memperluas pasar ekspor, menarik investasi asing, dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

Daniel S. Papp (1988) menambahkan bahwa dalam konsep kepentingan nasional, terdapat beberapa dimensi utama seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, serta aspek legalitas dan moralitas. Menurutnya, kepentingan nasional adalah faktor yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan luar negeri karena terkait erat dengan kelangsungan hidup, stabilitas politik, dan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Kebijakan luar negeri, menurut Papp, selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan vital tersebut (Papp, 1988).

Adapun Theodore Coulombis dan James Wolfe (1990-an) menegaskan bahwa kepentingan nasional adalah konsep fundamental yang digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan merumuskan kebijakan luar negeri. Dalam sistem internasional yang anarkis, negara dituntut untuk bertindak secara rasional dan realistis dalam mengejar kepentingannya demi mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan pengaruhnya di dunia internasional (Coulombis & Wolfe, 1990).

Kepentingan ekonomi bersifat vital karena berkaitan langsung dengan stabilitas internal dan daya saing global suatu negara. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Arab Saudi, kepentingan ekonomi sangat kentara melalui peningkatan *Foreign Direct Investment* (FDI) di sektor energi dan minyak. Bagi Indonesia, investasi ini menjadi alat strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, memperkuat kapasitas energi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sedangkan bagi Arab Saudi, FDI ini merupakan bagian dari agenda diversifikasi ekonomi dalam *Saudi Vision 2030*, dengan tujuan memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penetrasi di kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dengan demikian, kepentingan ekonomi menjadi pendorong utama di balik kebijakan

luar negeri kedua negara, sekaligus menjadi fondasi bagi kerja sama bilateral yang saling menguntungkan (Nuechterlein, 1976).

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kepentingan nasional memberikan pemahaman yang kuat mengenai bagaimana dan mengapa negara bertindak dalam sistem internasional. Teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis kebijakan luar negeri, termasuk dalam konteks *Foreign Direct Investment* (FDI) antara Arab Saudi dan Indonesia. Kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis bagaimana FDI dari Arab Saudi ke Indonesia mencerminkan tujuan strategis kedua negara. Bagi Arab Saudi, investasi ini adalah bagian dari strategi diversifikasi ekonominya dan eksplorasi pasar Asia. Sementara bagi Indonesia, investasi ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian energi dan mendukung pembangunan ekonomi.

### ***Diplomasi Perdagangan***

Berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam bidang ekonomi yang mencakup, namun tidak terbatas pada kegiatan ekspor dan impor, pinjaman dan bantuan luar negeri, perdagangan internasional dan investasi. Sesungguhnya dimensi ekonomi secara nyata membuat diplomasi terkoneksi langsung dengan kepentingan rakyat. Jika diplomasi ekonomi bermasalah maka kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional akan dirugikan dan akibatnya rakyat Indonesia harus dikorbankan (Jemadu, Susy, Fernando, & Limenta, 2015).

Diplomasi perdagangan merupakan salah satu bagian dari diplomasi ekonomi. Berridge menyatakan bahwa, *Generally diplomacy (including economic diplomacy) is 'the means by which states pursue their foreign policies* (Berridge, 2002). Diplomasi ekonomi adalah upaya untuk memperoleh keamanan ekonomi dalam sistem ekonomi internasional yang anarki. Diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat diplomasi tradisional seperti pengumpulan informasi, *lobbying*, representasi, negosiasi, dan advokasi untuk kebijakan ekonomi luar negeri yang lebih lanjut (Berridge, 2002). Dengan demikian, diplomasi ekonomi berfokus pada agenda ekonomi dalam diplomasi yang dapat dibedakan dari agenda politik. Hal ini tidak ada perbedaan dalam tipe diplomasi maupun aktor-aktor diplomasi.

Teori Diplomasi Perdagangan berfokus pada hubungan timbal balik antara perdagangan dan diplomasi. Teori Diplomasi perdagangan secara keseluruhan memiliki arti bagaimana negara-negara menggunakan perdagangan sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan diplomatik dan, sebaliknya, memanfaatkan diplomasi untuk memajukan kepentingan perdagangan (Dugis, 2016). Dalam konteks ini, perdagangan internasional bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga instrumen penting untuk memperkuat posisi strategis, membangun aliansi, dan menciptakan stabilitas politik. Asumsi dasar teori ini meliputi adanya interdependensi ekonomi antarnegara yang semakin erat di era globalisasi, konsep keunggulan komparatif yang mendorong negara untuk memaksimalkan manfaat perdagangan, serta peran negara sebagai aktor utama yang mengatur dan memfasilitasi hubungan

ekonomi lintas batas. Stabilitas politik juga menjadi faktor penting dalam teori ini, karena hubungan perdagangan yang berkelanjutan memerlukan iklim diplomatik yang kondusif (Purbal et al., 2023).

Tujuan utama dari diplomasi perdagangan adalah untuk meningkatkan ekspor, membuka pasar baru, melindungi pasar domestik, dan menarik investasi asing. Selain itu, negara-negara juga menggunakannya untuk mengamankan pasokan sumber daya penting, membangun aliansi strategis, dan mengatasi konflik perdagangan yang mungkin muncul, seperti sengketa tarif atau hambatan non-tarif. Instrumen utama yang digunakan dalam diplomasi perdagangan meliputi perjanjian perdagangan internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, seperti *Free Trade Agreement* (FTA) atau kerangka kerja WTO, negosiasi diplomatik untuk menyelesaikan konflik dagang, serta promosi dagang melalui pameran internasional dan delegasi bisnis. Diplomasi ekonomi, yang mencakup bantuan pembangunan atau investasi langsung asing, juga menjadi bagian penting dari strategi ini (Hutabarat & Damayanti, 2023).

Diplomasi perdagangan dapat dilihat pada peran WTO sebagai platform untuk menyelesaikan sengketa dagang, inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) oleh China yang menggabungkan diplomasi dan perdagangan untuk memperluas pengaruhnya, serta perjanjian perdagangan antara Uni Eropa dan Mercosur yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi lintas kawasan. Dominasi kepentingan ekonomi dalam diplomasi perdagangan terkadang mengabaikan isu penting lainnya, seperti lingkungan, hak asasi manusia, atau keberlanjutan sosial. Selain itu, beberapa negara menggunakan kebijakan proteksionisme terselubung yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang mereka promosikan (Yoshida & Kriswandwitanaya, 2023).

Kostecky dan Narcial mengidentifikasi beberapa tujuan yang rasional dalam diplomasi perdagangan, yaitu (Kostecky & Narcial, 2007) Diplomasi perdagangan bertujuan untuk memastikan akses yang andal dan netral terhadap informasi bisnis yang diperlukan. Sebelum FDI dilakukan, Arab Saudi membutuhkan akses informasi yang andal tentang potensi pasar energi di Indonesia, regulasi investasi, serta jaminan stabilitas. Di sinilah diplomasi perdagangan berperan membuka jalur komunikasi formal antar lembaga, mempertemukan pelaku bisnis, dan memfasilitasi riset pasar serta pertemuan bilateral. Diplomasi perdagangan dapat membantu memperbaiki citra dan kredibilitas bagi pendatang baru di pasar internasional yang mungkin mengalami kendala. Bagi Indonesia, diplomasi perdagangan digunakan untuk meningkatkan citra sebagai negara yang ramah investasi, terutama di sektor energi. Melalui kunjungan kenegaraan, partisipasi dalam forum G20, dan penyusunan kebijakan energi, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjadi mitra strategis Arab Saudi. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan investor. Diplomasi perdagangan juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis, seperti partisipasi pemerintah dalam kebijakan perdagangan penting, mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan akses terhadap pasokan barang dan jasa. FDI dari Arab Saudi ke sektor energi Indonesia sangat erat kaitannya dengan kebijakan strategis kedua negara: *Saudi Vision 2030* (diversifikasi ekonomi) dan *kemandirian energi Indonesia*.

Diplomasi perdagangan di sini digunakan sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan strategis yakni kebutuhan Arab Saudi untuk memperluas investasi global dan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat infrastruktur energi nasional.

Adapun definisi lain menurut Donna Lee yakni diplomasi perdagangan adalah sebagai penghubung diplomasi ekonomi yang menjelaskan perdagangan sebagai kerjasama dari *network* aktor publik dan swasta yang mengelola hubungan dagang menggunakan channel dan proses diplomasi (Donna & Hocking, 2010). Konsep yang paling berguna adalah *National Diplomatic System* (NDS) dimana konsep ini menangkap dengan baik diplomasi terkoordinasi yang beragam dan komple di mana pemerintah bekerjasama dengan partner seperti departemen lain dalam pemerintahan sebagaimana dengan kelompok bisnis dan kelompok sipil untuk menyampaikan tujuan-tujuan diplomasi (Yekti, 2018).

Diplomasi perdagangan digunakan dalam penelitian ini karena berperan penting dalam mendukung tujuan ekonomi dan kepentingan nasional kedua negara. Melalui diplomasi perdagangan, Indonesia dan Arab Saudi dapat memperkuat kerja sama bilateral, menciptakan peluang investasi, dan mengatasi hambatan perdagangan, terutama di sektor energi dan minyak. Diplomasi ini juga membantu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai mitra investasi yang stabil dan strategis, seperti yang tercermin dalam proyek Kilang Cilacap. Selain itu, diplomasi perdagangan memungkinkan pengelolaan hubungan ekonomi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen resmi pemerintah, dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, BKPM, dan Pertamina. Selain itu, penulis menggunakan sumber data sekunder dari jurnal akademik dan berita ekonomi yang kredibel. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis data tertulis yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utama adalah menganalisis dampak FDI Arab Saudi di sektor energi Indonesia selama tahun 2022–2023, termasuk bentuk investasi, peran diplomasi perdagangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Investasi Arab Saudi memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia, di antaranya (Agustin, 2023):

### **1. Peningkatan Kapasitas Energi Domestik**

Investasi di kilang dan infrastruktur membantu mengurangi ketergantungan impor BBM. Investasi pada modernisasi kilang, fasilitas regasifikasi LNG, dan proyek infrastruktur energi meningkatkan kapasitas pemrosesan dan pasokan energi domestik. Contohnya, program upgrade kilang

besar-besaran (*megarefinery*) bertujuan menaikkan *throughput* kilang sehingga volume produksi bahan bakar domestik meningkat dengan efek langsung menurunkan ketergantungan impor BBM dan memperbaiki ketersediaan pasokan untuk kebutuhan industri dan transportasi. Selain itu, pembangunan terminal LNG dan fasilitas penyimpanan dapat mengurangi volatilitas ketersediaan gas dan mempermudah distribusi ke wilayah yang sebelumnya kurang terlayani.

Investasi pada sektor kilang minyak di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kapasitas energi domestik dalam periode 2023–2026. Pertamina melalui proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) dan *Grass Root Refinery* (GRR) menargetkan kenaikan kapasitas kilang nasional hingga lebih dari 30 persen. Kilang Balikpapan, misalnya, sedang dalam proses ekspansi dari kapasitas 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari yang dijadwalkan rampung pada 2026 yang memungkinkan kilang ini mengolah *crude* sulfur tinggi. Kilang Balongan di Indramayu juga sedang ditingkatkan dari 125.000 barel per hari menjadi 150.000 barel per hari dengan target penyelesaian pada 2026, sehingga mampu meningkatkan yield produk bernilai tinggi termasuk petrokimia.

Sementara itu, Kilang Cilacap sebagai kilang terbesar di Indonesia telah ditingkatkan kapasitasnya dari 348.000 barel per hari menjadi 370.000 barel per hari pada 2023. Selain itu, pembangunan Kilang Tuban sebagai proyek kerja sama Pertamina dengan Rosneft diproyeksikan menambah kapasitas sebesar 300.000 barel per hari pada 2024 sekaligus menjadi kompleks petrokimia dengan kapasitas ethylene lebih dari 1 juta ton per tahun. Jika digabungkan, total tambahan kapasitas dari proyek-proyek tersebut mencapai sekitar 447.000 barel per hari, sehingga kapasitas olah nasional diperkirakan meningkat dari sekitar 1,1 juta barel per hari pada 2022 menjadi kurang lebih 1,55 juta barel per hari pada 2026. Peningkatan ini bukan hanya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, tetapi juga memperkuat ketahanan energi domestik Indonesia dalam jangka menengah serta meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan energi regional (Turner, 2022).

## 2. Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Melalui kerja sama teknis dan proyek bersama. Investasi FDI yang melibatkan perusahaan minyak besar (MNEs) biasanya menyertakan komponen kerja sama teknis, pelatihan tenaga kerja, dan *transfer know-how* operasi dan manajemen. Dalam sektor energi ini dapat berupa: teknik pemrosesan kilang tingkat lanjut, manajemen regasifikasi LNG, standar keselamatan industri, dan teknologi operasi pabrik (*procurement, maintenance, HSE*). Transfer ini mempercepat kapabilitas lokal untuk mengoperasikan, memelihara, serta mengembangkan proyek serupa di masa depan.

Transfer teknologi dan pengetahuan (*technology & knowledge transfer*) merupakan salah satu dampak strategis dari investasi asing langsung (FDI), khususnya ketika investasi tersebut terkait dengan perusahaan energi global berskala besar. Dalam konteks Indonesia, masuknya investasi Arab Saudi melalui Aramco dan dukungan dari *Public Investment Fund* (PIF) tidak hanya

berupa suntikan modal, tetapi juga membuka jalur masuk teknologi canggih dan praktik manajerial modern yang sebelumnya tidak tersedia di dalam negeri.

Hal ini sejalan dengan kebijakan *Saudi Vision 2030*, di mana PIF diposisikan sebagai kendaraan utama untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dan memperluas pengaruh globalnya. Berdasarkan laporan *Financial Times* (2024), PIF kini menguasai 16% saham Aramco setelah serangkaian transfer kepemilikan sejak 2022, sehingga memperkuat posisi keuangan dan kapasitas ekspansi global. Dengan kepemilikan ini, PIF memperoleh akses atas dividen besar Aramco yang dapat dipakai untuk mendanai proyek modernisasi dan kemitraan internasional, termasuk proyek kilang dan infrastruktur energi di Indonesia.

Dalam praktiknya, kerja sama antara Aramco–Pertamina di kilang Cilacap maupun wacana investasi pada proyek Tuban membuka ruang pertukaran pengetahuan teknis di bidang pengolahan minyak, manajemen pasokan energi, efisiensi operasional, serta standar lingkungan internasional. Teknologi yang dibawa tidak hanya meliputi infrastruktur kilang berkapasitas besar, tetapi juga metode pengolahan minyak sour crude, peningkatan yield produk bernilai tinggi (*gasoline, diesel Euro 5*), serta integrasi petrokimia modern. Selain itu, model pengelolaan korporasi dan tata kelola keuangan ala PIF yang lebih agresif juga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mengelola *state-owned enterprises* di sektor energi (Wilson, 2024).

### 3. Penyerapan Tenaga Kerja

Proyek-proyek energi berskala besar menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Proyek energi berskala besar (modernisasi kilang, pembangunan terminal LNG, fasilitas biofuel) memiliki fase konstruksi yang intensif tenaga kerja serta fase operasi yang menyerap tenaga kerja tetap dalam jumlah lebih kecil tapi berketerampilan lebih tinggi. Selain itu, kegiatan proyek mendorong permintaan terhadap sub-kontraktor lokal, jasa logistik, katering, perumahan pekerja dan lainnya.

Investasi asing langsung (FDI) terbukti berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data realisasi investasi triwulan I tahun 2023, total FDI mencapai Rp177 triliun atau sekitar 53,8% dari keseluruhan realisasi investasi nasional, melampaui realisasi investasi domestik (DDI) yang sebesar Rp151,9 triliun atau 46,2%. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih sangat tinggi, bahkan tumbuh 20,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, sektor-sektor strategis seperti industri logam dasar, barang logam, non-mesin, dan peralatan menempati posisi tertinggi dengan total investasi mencapai USD 2,9 miliar (BKPM, 2023).

Sektor-sektor padat modal tersebut, khususnya industri manufaktur, pertambangan, transportasi, serta kimia dan farmasi, memberikan efek berantai terhadap pasar tenaga kerja. Misalnya, proyek hilirisasi mineral di Sulawesi Tengah yang mencatatkan realisasi FDI terbesar senilai USD 1,9 miliar tidak hanya meningkatkan output industri, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja langsung di pabrik pengolahan serta pekerjaan tidak langsung pada sektor

logistik, perumahan, dan jasa pendukung lainnya. Distribusi investasi yang merata di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi Rp172,9 triliun atau 52,6% dari total realisasi nasional, juga membuka peluang kerja baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif tertinggal, seperti Sulawesi, Riau, dan Kalimantan.

Dengan demikian, FDI tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam penyediaan lapangan kerja berkualitas. Penyerapan tenaga kerja ini bersifat multiplikatif karena melibatkan berbagai sektor, mulai dari konstruksi infrastruktur, penyediaan jasa logistik, hingga pengembangan kawasan industri. Data BKPM (2023) menunjukkan bahwa sektor manufaktur secara konsisten menyumbang sekitar 42,5% dari total investasi, sekaligus menjadikannya sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja baru yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional (BKPM, 2023).

Masuknya FDI Arab Saudi ke Indonesia terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Proyek-proyek energi berskala besar seperti modernisasi kilang, pembangunan terminal LNG, serta fasilitas biofuel, menyerap ribuan tenaga kerja pada fase konstruksi dan menyediakan lapangan kerja tetap yang lebih berketerampilan tinggi pada fase operasional. Data BKPM (2023) menunjukkan bahwa realisasi FDI triwulan I tahun 2023 mencapai Rp177 triliun atau naik 20,2% dari tahun sebelumnya, di mana 53,8% merupakan investasi asing langsung. Peningkatan ini secara langsung mendorong penyerapan tenaga kerja baru, baik di sektor industri energi maupun sektor pendukung seperti logistik, jasa katering, hingga UMKM lokal. Secara empiris, setiap kenaikan 1% FDI meningkatkan produksi tenaga kerja sekitar 0,15% dalam lima tahun, dengan sekitar tiga perempat pekerjaan tercipta di perusahaan asing dan seperempat melalui rantai pasok lokal. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja setelah masuknya FDI, baik secara langsung melalui proyek utama maupun secara tidak langsung lewat *multiplier effect* pada perekonomian daerah (BKPM, 2023; Gonzalez et al., 2025; Wilson, 2024).

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Daerah sekitar proyek mengalami peningkatan aktivitas ekonomi (*multiplier effect*). Investasi energi memicu *multiplier effects* pada ekonomi daerah: peningkatan permintaan jasa lokal (logistik, akomodasi, jasa profesional), naiknya pendapatan rumah tangga pekerja yang meningkatkan konsumsi lokal, dan peluang usaha untuk UMKM sebagai pemasok barang/jasa. Efek ini dapat diukur pada peningkatan PDRB / output daerah, meningkatnya pendapatan pajak daerah, dan jumlah kontrak lokal yang diberikan.

Investasi asing langsung (FDI) memicu efek *multiplier* pada ekonomi lokal Indonesia melalui dua kanal utama: penciptaan lapangan kerja langsung di perusahaan investor dan peningkatan aktivitas pada pemasok domestik (*upstream linkages*). Bukti empiris menunjukkan bahwa setelah satu persen kenaikan FDI, produksi tenaga kerja di industri terkait meningkat sekitar 0,15 persen dalam jangka lima tahun, sementara peningkatan lapangan kerja di sektor hulu (*upstream*) mencapai 0,05 persen dalam periode yang sama; gabungan efek ini berarti sekitar tiga perempat pekerjaan yang tercipta berada di dalam perusahaan asing dan seperempat melalui pemasok lokal. Selain itu, pembelian

input domestik oleh perusahaan asing naik secara nyata sekitar 0,18 persen lima tahun setelah kenaikan FDI menunjukkan integrasi yang kuat antara investor asing dan rantai pasok lokal. Dampak ini mendorong tumbuhnya usaha lokal (UMKM) sebagai subkontraktor, peningkatan permintaan jasa logistik, dan kenaikan perputaran ekonomi daerah, yang secara agregat memperkuat PDRB regional dan pendapatan daerah (Gonzalez et al., 2025)

Jika dianalisis menggunakan teori kepentingan nasional (Morgenthau & Nuechterlein):

#### 1. Bagi Arab Saudi

FDI di sektor energi Indonesia merupakan strategi memperluas pengaruh ekonomi sekaligus memperkuat posisi globalnya. Hal ini sejalan dengan Saudi Vision 2030, di mana pemerintah menempatkan Public Investment Fund (PIF) dan Aramco sebagai kendaraan ekspansi internasional. Data menunjukkan bahwa kepemilikan PIF di Aramco telah meningkat menjadi 16%, dengan target mengelola aset sebesar USD 1 triliun pada 2025 (*Financial Times*, 2024). Strategi ini memungkinkan Saudi tetap memperoleh keuntungan dari dividen dan kepemilikan aset global, bahkan ketika negara mitra seperti Indonesia semakin mandiri energi. Dengan kata lain, meskipun Indonesia mengurangi impor minyak mentah dari Saudi akibat peningkatan kapasitas kilang domestik, Saudi tetap mempertahankan kepentingan ekonominya melalui kepemilikan langsung dalam proyek energi Indonesia. Bagi Indonesia, masuknya FDI Saudi menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, menekan defisit neraca perdagangan migas, dan memperkuat infrastruktur energi strategis.

#### 2. Bagi Indonesia

FDI ini menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mengurangi defisit neraca perdagangan energi, dan memperkuat infrastruktur.

Sementara itu, teori diplomasi perdagangan menjelaskan bagaimana Indonesia dan Arab Saudi menggunakan diplomasi sebagai alat untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Diplomasi ini tidak hanya terjadi di level negara, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, kementerian teknis, dan organisasi internasional. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi naik dari USD 1,6 miliar (2018) menjadi USD 2,2 miliar (2021), meskipun posisi Indonesia masih di bawah negara ASEAN lainnya seperti Thailand. Produk yang diekspor meluas dari energi ke makanan, peralatan rumah tangga, properti, dan tekstil. Banyak UMKM makanan memperoleh peluang berkat dukungan promosi pemerintah dan penguatan sertifikasi halal. Proyek-proyek hasil FDI turut menyerap tenaga kerja dalam negeri, terutama di sektor manufaktur dan distribusi (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Berdasarkan Kepentingan Nasional, dapat diketahui bahwa Arab Saudi ingin memperkuat pengaruh ekonomi dan politik melalui perluasan investasi di negara-negara mitra strategis. Indonesia, sebagai negara Muslim dengan jumlah penduduk besar, menjadi target strategis dalam perluasan investasi halal, properti, dan energi. Di sisi lain, Ekonomi Politik Internasional melihat bahwa FDI Arab Saudi dapat dilihat sebagai instrumen diplomasi ekonomi untuk

meningkatkan daya tawar regional. Bagi Indonesia, kebijakan diplomasi perdagangan menjadi alat untuk mengakselerasi pembangunan sektor strategis melalui kerja sama internasional.

Sebagai bagian dari upaya diversifikasi sektor investasi dalam kerangka *Saudi Vision 2030*, sektor perikanan dan makanan laut di Arab Saudi mengalami perkembangan yang pesat dan menjanjikan. Berdasarkan data Atase Perdagangan KBRI Riyadh, permintaan terhadap produk ikan dan makanan laut meningkat signifikan sejak tahun 2020, dengan proyeksi pasar mencapai USD 1,18 miliar pada tahun 2029.

Selain sektor energi dan minyak yang telah menjadi fokus utama dalam *Foreign Direct Investment (FDI)* Arab Saudi ke Indonesia, peluang investasi juga semakin terbuka pada sektor non-migas, khususnya produk perikanan dan makanan laut. Berdasarkan laporan *Market Intelligence* Atase Perdagangan KBRI Riyadh tahun 2024, nilai pasar makanan laut di Arab Saudi diperkirakan mencapai USD 1,05 miliar pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 1,18 miliar pada tahun 2029, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 2,24%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Arab Saudi untuk menjalani pola makan sehat, urbanisasi, dan tingginya konsumsi ikan per kapita yang mencapai 8 kg per tahun pada 2022. Jenis ikan segar dan udang merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi, dengan udang mencatatkan pertumbuhan tercepat sebesar 4,75% per tahun.

Indonesia sebagai negara produsen produk perikanan dengan nilai ekspor global sebesar USD 3,6 miliar pada 2023, sebenarnya memiliki peluang besar untuk menembus pasar Arab Saudi. Namun, realitas menunjukkan bahwa ekspor Indonesia untuk produk perikanan ke Arab Saudi masih tergolong kecil, yakni hanya sebesar USD 1,86 juta dan menempatkan Arab Saudi pada posisi ke-36 sebagai tujuan ekspor produk ikan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Arab Saudi masih sangat terbuka dan belum digarap secara maksimal oleh pelaku usaha Indonesia.

Transformasi ekonomi melalui *Saudi Vision 2030* mendorong Arab Saudi untuk tidak lagi bergantung pada minyak sebagai sumber utama pendapatan. Pemerintah setempat aktif mengembangkan sektor perikanan melalui Program Nasional Pengembangan Perikanan (NFDP), dengan target produksi akuakultur sebesar 600.000 ton pada tahun 2030. Inisiatif ini mencakup pelatihan 3.000 warga Saudi di sektor akuakultur serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti pusat pendidikan perikanan dan fasilitas rantai dingin distribusi. Upaya ini membuka ruang bagi pelaku industri Indonesia tidak hanya sebagai eksportir, tetapi juga mitra investasi langsung atau dalam bentuk *joint venture* di bidang budidaya, pengolahan, dan distribusi produk makanan laut.

Model bisnis yang dianut di Arab Saudi sangat mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan personal, sehingga strategi penetrasi pasar bagi Indonesia harus mengedepankan kerja sama jangka panjang dengan mitra lokal. Penetrasi dapat dilakukan melalui ekspor langsung, pembentukan kantor perwakilan, serta partisipasi aktif dalam pameran dagang produk Indonesia

yang rutin diselenggarakan di Arab Saudi, terutama menjelang musim haji dan umrah.

Dengan demikian, peluang kerja sama ekonomi Indonesia–Arab Saudi tidak lagi terbatas pada sektor energi dan minyak semata, namun mulai berkembang ke sektor strategis lainnya seperti perikanan. Sektor ini berpotensi menjadi tulang punggung baru kerja sama bilateral, terutama dalam kerangka FDI yang mendorong transformasi ekonomi kedua negara secara berkelanjutan.

Tabel 1. Data Proyek Investasi Energi Arab Saudi di Indonesia (2022–2023) (LBBP RI, 2023).

No	Proyek FDI	Lokasi	Sektor Energi	Nilai Investasi (USD)	Mitra Lokal
1	Modernisasi Kilang Minyak Cilacap	Cilacap, Jateng	Pengolahan Minyak	\$5,5 Miliar	PT Pertamina
2	Pengembangan Infrastruktur LNG	Jawa Timur	Gas Alam	\$1,2 Miliar	PT PGN
3	Proyek Biofuel Berbasis Sawit	Riau	Energi Terbarukan	\$600 Juta	PT Pertamina
4	Investasi Gudang Energi di Kalimantan	Kaltim	Energi Terintegrasi	\$250 Juta	Mitra Swasta Nasional
5	Pelatihan Teknologi Energi Bersih	Jakarta	SDM & Teknologi	\$30 Juta	Bappenas & ESDM

Investasi langsung Arab Saudi ke Indonesia dalam sektor energi dan minyak tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan strategis. Berdasarkan studi oleh Alrasheed et al. (2021), beberapa faktor utama yang mendorong FDI dari Arab Saudi adalah *market seeking*, *efficiency seeking*, keterbukaan perdagangan (*trade openness*), kualitas kelembagaan (*institutional quality*), serta stabilitas makroekonomi. Dalam konteks Indonesia, faktor *market seeking* menjadi daya tarik utama mengingat tingginya konsumsi energi dalam negeri yang terus meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan posisi geostrategis di Asia Tenggara menawarkan peluang efisiensi distribusi energi untuk pasar regional, yang menjadi alasan bagi Arab Saudi untuk menempatkan investasinya di Indonesia.

Faktor lainnya yang tak kalah penting adalah *trade openness* Indonesia yang secara konsisten membaik, terutama dengan perbaikan indeks *Ease of Doing Business* (EODB) dan penyederhanaan izin usaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Reformasi struktural ini memberikan sinyal positif kepada investor, termasuk dari Arab Saudi, bahwa Indonesia semakin terbuka dan siap menerima investasi asing di sektor strategis seperti energi (Budiarso, 2019). Di sisi lain, stabilitas politik dan peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral seperti G20 juga memperkuat kepercayaan Arab Saudi terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan proyek-proyek investasi di Indonesia. Secara umum, Indonesia dinilai memenuhi beberapa determinan utama FDI versi UNCTAD dan World Bank, yakni ukuran pasar, infrastruktur dasar, keterbukaan regulasi, serta keberadaan zona industri dan insentif fiskal untuk investasi energi dan hilirisasi sumber daya alam (Indonesia, 2022).

Tabel 2. FDI Arab Saudi ke Indonesia dalam sektor energi (CEIC, 2024)

Tahun	FDI ke Indonesia (SAR juta)	FDI ke Indonesia (USD Juta)	FDI ke Indonesia (USD miliar)
2022	8.612	2.325	\$2,33 Miliar
2023	12.586	3.398	\$3,40 Miliar

Peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam memfasilitasi *Foreign Direct Investment* dari Arab Saudi menjadi salah satu aspek penting yang mendukung peningkatan kerja sama bilateral. Diplomasi perdagangan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui negosiasi formal, tetapi juga melalui representasi dalam forum-forum global, kerja sama antar kementerian teknis, serta promosi investasi lintas negara melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keberhasilan diplomasi ini tercermin dalam berbagai hasil kunjungan kenegaraan, seperti kunjungan Raja Salman pada 2017 yang menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) strategis dalam sektor energi, serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum G20 dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Diplomasi ini turut memperkuat persepsi Arab Saudi terhadap Indonesia sebagai mitra investasi yang stabil dan strategis (Widiatmika, 2024).

Di sisi kebijakan domestik, Pemerintah Indonesia juga aktif menyusun kebijakan yang ramah terhadap investor asing di sektor energi. Salah satunya adalah Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan, yang memberi ruang bagi skema kerja sama investasi publik-swasta (*Public Private Partnership*) dan insentif pajak untuk investasi energi bersih. Selain itu, penerapan UU Cipta Kerja juga dianggap memperkuat kepastian hukum investasi melalui reformasi perizinan, kepastian hak atas lahan, dan efisiensi birokrasi. Upaya Indonesia untuk mendorong transisi energi dari fosil ke energi terbarukan juga sejalan dengan strategi diversifikasi ekonomi Arab Saudi dalam kerangka *Saudi Vision 2030*. Kesamaan orientasi kebijakan ini menjadi fondasi kuat bagi sinergi diplomasi dan strategi ekonomi kedua negara, khususnya dalam mempercepat aliran investasi di sektor energi dan minyak (Kementerian Keuangan, 2024).

Investasi Arab Saudi dalam proyek energi tidak hanya terbatas di Indonesia, namun juga dapat dilihat dari proyek global sebagai benchmark untuk kerja sama masa depan. Salah satu contoh besar adalah Sudair *Solar PV Project* di Arab Saudi, yang menjadi proyek energi surya terbesar di kawasan Timur Tengah dengan kapasitas 1,5 GW dan nilai investasi mencapai USD 924 juta. Proyek ini dikembangkan oleh perusahaan energi terbarukan ACWA *Power* yang didukung penuh oleh *Public Investment Fund* (PIF) milik pemerintah Arab Saudi. Keberhasilan proyek ini menunjukkan keseriusan Arab Saudi dalam merambah sektor energi bersih dan membangun kapasitas nasional dalam teknologi terbarukan. Dalam konteks Indonesia, kehadiran proyek-proyek semacam ini dapat menjadi acuan bahwa Arab Saudi memiliki sumber daya dan komitmen kuat untuk mereplikasi model serupa di negara mitra seperti Indonesia, khususnya dalam pengembangan *solar farm*, biofuel berbasis sawit, dan pembangkit listrik tenaga angin.

Kesamaan kebutuhan Indonesia dan Arab Saudi dalam mempercepat transisi energi juga memberikan peluang kolaborasi yang lebih luas. Indonesia

melalui PT Pertamina dan anak usahanya di bidang Energi Baru Terbarukan (EBTKE) telah membuka peluang kerja sama dalam pengembangan bahan bakar nabati dan bioenergi. Sebagai contoh, proyek biofuel di Riau yang didukung oleh Aramco menjadi langkah awal integrasi FDI Arab Saudi ke dalam sektor energi bersih Indonesia. Jika Indonesia mampu menawarkan model insentif yang kompetitif dan jaminan kepastian hukum yang kuat, bukan tidak mungkin bahwa model investasi ACWA Power dalam proyek Sudair dapat direplikasi di wilayah-wilayah potensial Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, atau Kalimantan Timur yang memiliki paparan matahari tinggi dan lahan tersedia untuk *solar panel*.

Peningkatan FDI Arab Saudi ke Indonesia memiliki dampak strategis terhadap dua aspek utama: penguatan ekonomi nasional dan pengokohan posisi Indonesia dalam tatanan hubungan bilateral. Dari sisi ekonomi, investasi langsung dalam proyek kilang minyak, LNG, dan biofuel telah memberikan dampak nyata dalam bentuk peningkatan kapasitas energi domestik, penciptaan lapangan kerja lokal, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi regional di sekitar lokasi proyek. Misalnya, modernisasi kilang Cilacap tidak hanya meningkatkan efisiensi pengolahan minyak domestik, tetapi juga mengurangi ketergantungan impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan energi nasional. Proyek-proyek energi ini memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor logistik, konstruksi, pendidikan vokasi, serta penyediaan layanan sosial di daerah-daerah sekitar proyek.

Di sisi hubungan bilateral, FDI ini berfungsi sebagai pengikat strategis antara Indonesia dan Arab Saudi. Hubungan yang awalnya bersifat religius-kultural kini berkembang ke arah kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam kacamata teori Kepentingan Nasional, Arab Saudi mendapatkan akses ke pasar energi dan ekspansi ekonomi di Asia Tenggara, sementara Indonesia memperoleh manfaat dalam bentuk modal, teknologi, dan akses jaringan perdagangan global. Selain itu, diplomasi perdagangan yang dilakukan Indonesia juga berhasil membangun citra sebagai mitra strategis yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan demikian, FDI dari Arab Saudi ke sektor energi dan minyak tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi strategis jangka panjang bagi stabilitas dan kedaulatan energi Indonesia.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) dari Arab Saudi memberikan kontribusi nyata terhadap sektor energi dan minyak di Indonesia pada tahun 2022–2023. Investasi yang dilakukan oleh Arab Saudi, khususnya melalui proyek kilang minyak di Cilacap, pengembangan infrastruktur LNG, dan proyek biofuel berbasis sawit, telah meningkatkan kapasitas energi domestik dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. FDI ini juga membawa dampak ekonomi berupa penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di sekitar lokasi proyek. Dalam hal ini, diplomasi perdagangan yang dijalankan Indonesia memainkan peran penting sebagai

jembatan komunikasi antara kedua negara, baik melalui negosiasi bilateral, forum internasional, maupun promosi investasi strategis oleh lembaga terkait seperti BKPM dan Kementerian Luar Negeri.

Motivasi utama Arab Saudi dalam menanamkan investasi di sektor energi Indonesia didorong oleh dua faktor, yakni market seeking dan efficiency seeking. Indonesia yang memiliki pasar energi besar serta posisi geografis yang strategis menjadikan negara ini sangat menarik bagi investor Arab Saudi. Perbaikan iklim investasi nasional, stabilitas politik, dan insentif fiskal turut memperkuat daya tarik tersebut. Namun demikian, keberhasilan FDI ini juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah kompleksitas birokrasi, ketidaksesuaian standar ekspor seperti SASO dan SALEEM, serta perbedaan sistem hukum dan budaya bisnis antara Indonesia dan Arab Saudi. Fluktuasi harga minyak global dan kondisi geopolitik juga menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan investasi ini.

Secara keseluruhan, FDI dari Arab Saudi tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama bilateral jangka panjang. Dari relasi yang semula didominasi oleh ikatan kultural dan religius, kini berkembang menjadi kemitraan ekonomi strategis yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini selaras dengan kepentingan nasional masing-masing negara, di mana Arab Saudi berupaya memperluas pengaruh ekonomi dan melakukan diversifikasi ekonomi melalui Saudi Vision 2030, sementara Indonesia memanfaatkan FDI sebagai instrumen penting dalam penguatan infrastruktur dan kemandirian energi nasional.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis efektivitas FDI Arab Saudi dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju energi terbarukan pasca 2023. Kajian berikutnya juga perlu menilai sinergi antara kebijakan investasi Arab Saudi dan diplomasi perdagangan Indonesia, guna mengidentifikasi peluang peningkatan kerja sama strategis serta transfer teknologi hijau yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, N. (2023). Dampak Peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi Kepada Indonesia Terhadap Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam System Market Seeking dan Efficiency Seeking. *Jurnal Universitas Sriwijaya*, 1(2), 1-14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Anwar, A. (2022). Kerjasama Ekonomi Arab Saudi-Indonesia Dalam Bidang Investasi Dan Perdagangan. *Jurnal UIN*, 1(2), 1-16. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA ANWAR.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70953%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70953/1/AMELIA%20ANWAR.FISIP.pdf)
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Belajar.
- Beard, C. A. (1934). *The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy*. Macmillan.
- BKPM. (2023). Investment Realization Grows 16.5%, Ministry of Investment Showcases Optimism in 2023. BKPM.

- Budiarso, A. (2019). *Kerja Sama Multilateral Indonesia Di Sektor Keuangan*. In IPB Press.
- CEIC. (2024). *Foreign Direct Investment Inflow Indonesia*. Ceicdata. [https://www.ceicdata.com/en/saudi-arabia/foreign-direct-investment-isic4-by-country-annual/foreign-direct-investment-inflow-indonesia?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.ceicdata.com/en/saudi-arabia/foreign-direct-investment-isic4-by-country-annual/foreign-direct-investment-inflow-indonesia?utm_source=chatgpt.com)
- Coulombis, T. A., & Wolfe, J. H. (1990). *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Prentice-Hall.
- Damanik, R., Noor, R., Muliawan, I., Arman, & Saragih, M. (2023). *Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045*.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)*. Cakra Studi Global Strategi.
- ESDM. (2020). *Jurnal Migas 1*. *Jurnal Migas*, 3(5), 1-34.
- Gonzalez, A. S., Reed, T., & Pasha, M. (2025). *Leveraging Foreign Direct Investment in Indonesia: Assessing Foreign Investor's Use of Domestic Suppliers*. *SSRN Electronic Journal*, 1(65), 1-5. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5126068>
- Hakim, A. L. (2023). *Pengaruh Foreign Direct Investment, Kurs Rupiah, Tingkat Inflasi dan Industri Halal Terhadap Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia Tahun 2014 - 2018*. *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*, 2(2), 92-93.
- Halimah, L. (2024). *Kebijakan Visi Saudi 2030 Dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi Arab Saudi Tahun 2014-2016*. Skripsi UIN, 1(1), 1-12.
- Havrlant, D., & Darandary, A. (2021). *Economic diversification under Saudi Vision 2030: Sectoral changes aiming at sustainable growth*. *Research Gate*, 12(4), 1-34. <https://doi.org/10.30573/KS--2021-DP06>
- Hutabarat, L. F., & Damayanti, A. (2023). *Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan*. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 428. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.3>
- Indonesia, I. (2022). *Gpr Together , Gpr Stronger : Dari Humas Pemerintah Indonesia Kita Pulih Bersama*. Litbangdiklat Press.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Market Intelligence: HS 200811/9 Camilan Atau Snack di Arab Saudi*.
- Kementrian Keuangan. (2024). *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* (pp. 1-324).
- LBBP RI. (2023). *Laporan Kinerja KBRI Riyadh* (pp. 1-71).
- McGonagle, Jr., J. J., & Vella, C. M. (2024). *Market Intelligence*. In *New Archetype for Competitive Intelligence*. <https://doi.org/10.5040/9798400690716.ch-007>
- Minhajuddin, & Santika. (2023). *Prospek Pertumbuhan Ekonomi Islam Indonesia Melalui Perjanjian Kemitraan IUAE-CEPA*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 9071-9085.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Papp, D. S. (1988). *Contemporary International Relations: Frameworks for*

- Understanding. Macmillan Publishing Company.
- Pertamina. (2023). Crisis: a Pathway To Enhance Energy Resilience. *Buletin Pertamina*, 9(3), 1-129. <https://www.energyinstitute.id/>
- Purbal, B., Handayani, S. A., Azizah, L. N., & Sibarani, J. C. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464-2473. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>
- Putri, A. M. (2024). Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 85-102.
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2023). Peta Jalan Indonesia Emas 2045. Kadin Indonesia.
- Salwadi, K. A. (2019). Alasan Peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi Di Indonesia Pasca Visi 2030 Saudi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(9), 1689-1699.
- Sianturi, N. (2017). Pengaruh Saudi Vision 2030 dan Agenda Foreign Direct Investment (FDI) Arab Saudi di Indonesia. *Jom Fisip*, 4(2), 1-15.
- Sinaga, E. (2025). Strategi Ekonomi Arab Saudi dalam Mewujudkan Rewarding Opportunities pada Saudi Vision 2030. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional-FISIP-UNJANI*, 2(1), 1-15. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2732>
- Sophianti, N. (2024). Diplomasi Indonesia-Arab Saudi: Peran TKI dalam Hubungan Bilateral dan Implikasinya. *Hispria Vitae*, 4(2), 66-75.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Syaputra, F. F., & Prasodjo, H. (2023). Saudi Arabia's Efforts in Implementing Saudi Vision 2030. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 70. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6294>
- Turner, E. (2022). Strong demand in Asia-Pacific. S&P Global.
- Widiatmika, K. P. (2024). LKJ Tahun 2023. Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau, 16(2), 39-55.
- Wilson, T. (2024). Saudi Arabia Transfers \$163bn Stake of Oil Producer Aramco to its Wealth Fund. *Financial Times*.
- Yekti, S. N. (2018). Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam Rantai Pertambahan Nilai Global Produk Tekstil ke Pasar Timur Tengah. *Politea*, 1(2), 167. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4322>
- Yoshida, Y. H., & Kriswandwitanaya, M. F. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G-20 Tahun 2022. *Global Mind*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.53675/jgm.v5i1.1063>